

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut principal (*Principal*) yang menyewa pihak lain yang disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang Jensen dan Meckling (1976). Dalam hal ini pihak principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agen. Prinsipal memberikan tanggung jawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Sektor publik pemerintahan akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Shende (2004). Jadi, penyajian laporan keuangan instansi pemerintah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah.

Implikasi yang ditimbulkan dari perspektif hubungan antara agent dan principal terjadi karena pihak agent memiliki keunggulan berupa informasi keuangan, daripada pihak principal, sedangkan dari pihak principal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan

self interest-nya yang dimulai dari proses, penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu, juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak principal. Salah Satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah adanya akuntabilitas laporan keuangan jadi pemerintah bertugas mewujudkan agar laporan keuangan dan aksebilitas laporan keuangan dapat terwujud.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan

1. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas Bastian (2009). Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan untuk satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Sedangkan menurut para ahli lainnya pengertian laporan keuangan sektor publik adalah:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.” (Bastian, 2009).

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor public merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas public menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor public untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan” (Mardiasmo, 2004).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah

- c. Satuan organisasi dilingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan baik sektor publik maupun swasta. Tujuan dari laporan keuangan tersebut yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, Laporan Keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30, UU No.17/2013 tentang keuangan negara meliputi laporan realisasi APBN/D, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 adalah digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan manajemen yaitu membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan laporan keuangan sangat penting bagi pada organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Kriteria tersebut diatas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengaskan atau

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara Eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan penggunaan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3. Sistem Informasi Manajemen.

1. Definisi Sistem

Sistem dalam suatu institusi pemerintahan sangatlah penting, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Terdapat berbagai pendapat yang mendefinisikan definisi sistem ,seperti dibawah ini : Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan , berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. (Jogiyanto, 2005).

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur nyang saling berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Definisi sistem juga dapat dijelaskan oleh Jogiyanto dalam bukunya Analisia dan Desain sistem informasi, menerangkan:“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. (Jogiyanto, 2005).

Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain,untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem yang dituju. Secara umum sistem informasi di definisikan sebagai berikut: “Sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan denagn cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. (Sutanta, 2003)

2. Definisi Informasi

Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan Data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan. Pengertian informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang.” (Sutanta, 2003)

3. Definisi Manajemen

Menurut Sutanta (2003) Manajemen dapat diartikan sebagai proses memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen juga dapat dimaksudkan sebagai suatu system kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-orang menajalankan pekerjaan. Umumnya, sumber daya yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Konsep sumber daya manajemen ini akan menjadi bertambah ketika pembahasan difokuskan pada Sistem Informasi Manajemen. Dalam Sistem Informasi Manajemen, sumber daya manajemen meliputi tiga sumber daya tersebut ditambah dengan sumber daya berupa informasi.

Dalam upaya memanfaatkan sumber daya manajemen tersebut, para manajer akan melakukan tiga macam proses manajemen, yang meliputi.

1. Perencanaan.
2. Pengendalian (meliputi: pengorganisasian, pergerakan, dan koordinasi).
3. Pengambilan keputusan.

Proses manajemen dapat dilakukan dalam tiga tingkatan kegiatan manajemen. Tingkatan kegiatan manajemen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan dan pengendalian operasional
2. Perencanaan taktis dan pengendalian manajemen
3. Perencanaan strategis

Tingkat perencanaan operasional dan pengendalian manajemen merupakan kegiatan manajemen pada tingkat paling rendah. Tingkat perencanaan taktis dan pengendalian manajemen merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah. Sedangkan tingkat perencanaan strategis merupakan tingkat kegiatan manajemen paling atas. Ketiga tingkatan kegiatan manajemen tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah piramida seperti ditunjukkan oleh gambar 2.1



Gambar 2. 1 Tingkatan kegiatan manajemen

4. Definisi Sistem Informasi Manajemen

Istilah Sistem Informasi Manajemen sebenarnya terdiri atas tiga kata kunci, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Definisi Sistem Informasi Manajemen adalah dimulai dengan memahami istilah sistem, informasi, dan manajemen. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dapat

digunakan untuk memberikan definisi tentang Sistem Informasi Manajemen, yaitu menggabungkan ketiga kata kunci tersebut.

Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*Output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut. (Sutanta, 2003)

2.4. Pengendalian Intern

Menurut Rai (2010) “ Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.”

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Komponen pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh *Committee Of Sponsoring Organizations* (COSO) Arens (2014), sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian internal terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal dan pentingnya pengendalian internal tersebut terhadap entitas. Untuk memahami dan

menilai lingkungan pengendalian, beberapa elemen penting di antaranya yaitu:

- a) Integritas dan Nilai Etika
- b) Komitmen Terhadap Kompetensi
- c) Partisipasi Dewan Direksi dan Komisaris atau Komite Audit
- d) Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi
- e) Struktur Organisasi
- f) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

2. Penilaian Resiko

Menilai resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Resiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur. Kemungkinan terdapat banyak aktivitas pengendalian pada setiap entitas, termasuk pengendalian secara manual dan pengendalian secara otomatis. Aktivitas pengendalian tersebut umumnya termasuk kedalam salah satu dari kelima jenis aktivitas berikut:

- a) Pemisahan tugas yang memadai
- b) Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas
- c) Dokumen dan catatan yang memadai
- d) Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan
- e) Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen.

4. Informasi dan Komunikasi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait.

5. Pengawasan

Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan terjadi perubahan kondisi.

2.5. Akuntabilitas

Menurut Indradi (2006) Akuntabilitas adalah perbuatan (hal) bertanggungjawab, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat, keadaan dapat dimintai pertanggungjawababan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam Mardiasmo (2004) yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*VerticalAccountability*)

Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat).

Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas memiliki beberapa aspek atau dimensi, Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek atau dimensi akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku didalam penggunaan sumber dana publik. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran pengukurannya dengan penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pertanggungjawaban lembaga publik didalam melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif dalam hal kecukupan efisiensi sistem informasi. Akuntabilitas proses dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja karena untuk memeriksa terhadap kinerjanya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau terjadi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas proses ialah bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dari ketidak efektifan organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga publik baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu

yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, *stakeholder* amana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, tahun dan Judul	Variabel	Hasil
1	Irawati, Salju, Hapid (2017)	Pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Telkom Kota Palopo	(1) Penggunaan sistem informasi manajemen di PT Telkom termasuk kategori sangat baik. (2) Kualitas laporan keuangan termasuk kategori sangat baik. (3) Pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen yang digunakan, baik dalam memahami penggunaannya sehingga dalam mengelola data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2	Torang P. Simanjuntak (2019)	Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen keuangan	1. Penerapan Sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dinyatakan semakin baik sistem

		daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten karo	informasi manajemen maka kualitas laporan keuangan juga akan mengalami peningkatan.
3	Jezhica, Grace, Heince (2019)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado. 2. Pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado. 3. Pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan Pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.

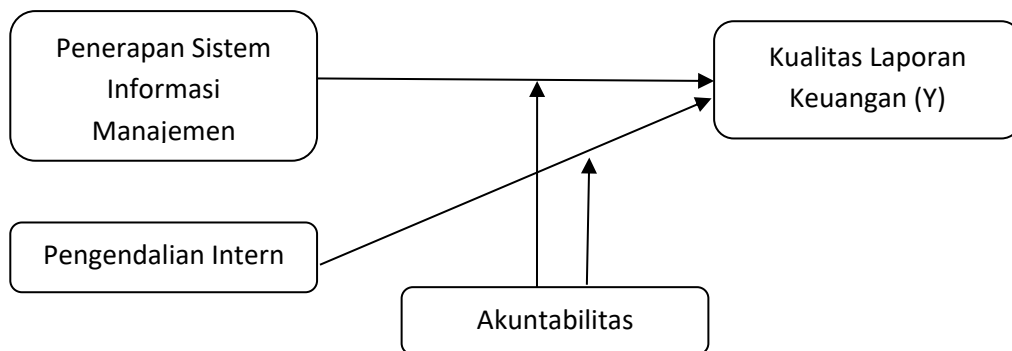
4	Oka Reza Aditya (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu sudah sangat baik, dengan perolehan skor aktual sebesar 2084 dibandingkan dengan skor ideal sebesar 2320 atau sebesar 89,83 %; 2. Kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu sudah sangat baik, dengan perolehan skor aktual sebesar 997 dibandingkan dengan skor ideal sebesar 1120 atau sebesar 89,02 %. Hal ini didukung dengan kualitas laporan keuangan telah di lakukan secara relevan, andal dan dapat dibandingkan;. 3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5	Ni Made Ayu Resa Mulyani, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi	Analisis Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik dan Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Motivasi Pelayanan Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. 2. Variabel Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	Yuniarta (2017)	Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)	Kinerja Organisasi yang mendukung meningkatnya kinerja organisasi sector publik. 3. Bagi penelitian-penelitian berikutnya yang juga ingin menggunakan variable motivasi pelayanan public diharapkan agar mampu menemukan solusi agar variable motivasi pelayanan publik dapat mempengaruhi kinerja organisasi sector publik.
6	Heppy Kurnia Ardilla (2018)	Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel	1. Budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. 2. Variabel Akuntabilitas memoderasi (memperkuat) pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. 3. Variabel Akuntabilitas memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pengendalian

		Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro)	intern terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
--	--	--	--

2.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.7.1 Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Informasi Manajemen merupakan bidang terobosan teknologi baru dalam mendukung program revolusi industri 4.0 yang sangat berpengaruh terhadap karakteristik manajemen pekerjaan untuk mendukung tantangan yang ada di Perguruan Tinggi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan.

Sistem informasi manajemen harus meningkatkan efektifitas, perencanaan yang baik untuk perusahaan dan menghasilkan output data atau informasi yang

berguna bagi perusahaan. Agar laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik apabila pengguna system informasi manajemen mampu mengelola keuangan dengan jujur tanpa ada kecurangan di dalamnya yang akan mengakibatkan dampak negatif untuk perusahaan. Laporan keuangan juga dijadikan bahan pertimbangan keputusan. Untuk itu pentingnya laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan dalam pengambilan keputusan. Karena Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sudah memenuhi criteria relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan..

Berdasarkan penelitian Irawati, Salju, Hapid (2017) dengan adanya sistem informasi manajemen yang baik sangat berpengaruh baik terhadap kualitas laporan keuangan, untuk itu dari penelitian tersebut subjek dalam penelitian ini perlu memperhatikan system informasi manajemen yang digunakan, baik dalam memahami penggunaannya sehingga dalam mengelolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan.

2.7.2 Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Wawan (2009) Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan sistem akuntansi keuangan yang ditetapkan berjalan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan system akuntansi keuangan pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan keasalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-baigan yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Salah satu

bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal.

Dalam pelaksanaan pengendalian Intern terdapat unsur-unsur yang mendukung terciptanya *good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai Instansi Pemerintah. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan yang dalam hal ini adalah menjadi unsur dari kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri sehingga tercipta mekanisme saling uji.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dengan semakin meningkatnya kegiatan pengendalian maka berdampak pula pada kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Berdasarkan penelusuran teori dan penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

2.7.3 Akuntabilitas memperkuat hubungan antara Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, sedangkan pada PP no 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya tantangan yang ada pada Perguruan Tinggi di era Industri 4.0 tentunya pengembangan teknologi juga akan mendukung dalam penerapan Akuntabilitas. Dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen itu sendiri di perguruan tinggi tentunya ada peranan penting pada kinerja pengelola keuangan yang akan berpengaruh pada kualitas kinerja atau hasil pekerjaan yang akan didapatkan pada suatu perusahaan. Dengan Nilai Akuntabilitas yang menjadi salah

satu dasar pada pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas jabatannya seperti kejujuran, integritas, moral dan etika akan memperkuat hubungan antara penerapan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan oleh karena itu Akuntabilitas memoderasi hubungan tersebut. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Made, Kadek, Adi (2017) yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas memoderasi hubungan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. Dengan adanya Akuntabilitas dalam diri semua karyawan maka karyawan mampu untuk menerima dan menerapkan sistem informasi akuntansi yang diterapkan pemerintah sehingga pelaporan keuangan pun dapat terselesaikan dengan tepat waktu sehingga nantinya akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang dalam hal ini maka akan meningkatkan hubungan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Akuntabilitas memperkuat hubungan antara sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan.

2.7.4 Akuntabilitas memperkuat hubungan antara Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas dapat disimpulkan adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif. Dalam PP no 8 tahun 2006 menjelaskan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang sebagaimana dimaksud juga sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penanggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan member pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara untuk menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan Negara untuk menyampikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud menyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan SAP.

Sedangkan Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi, organisasi, manajemen dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan organisasi dalam kategori berikut: a) efektifitas dan efisiensi operasi, b) keandalan pelaporan keuangan, c) ketaatan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian pemerintah (SPIP) yang dalam hal ini harus ditetapkan sebagaimana mestinya oleh organisasi sektor publik sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang bebas dari permasalahan yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan. Kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan terjadi selain tingkat korupsi yang tinggi juga disebabkan oleh kebocoran anggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurnia (2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memoderasi pengaruh antara pengendalian intern terhadap kinerja sektor publik. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akuntabilitas maka semakin kuat pengaruh antara pengendalian intern dengan kinerja sektor publik. Dengan adanya akuntabilitas seluruh pegawai melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tanggungjawabnya, kemudian kejelasan sasaran anggaranpun akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan, serta akan mampu untuk menerima dan menerapkan informasi akuntansi sehingga pelaporan keuangan pun dapat terselesaikan dengan tepat waktu yang akan berpengaruh terhadap kinerja sektor publik tersebut. Berdasarkan penelusuran teori dan penelitian itu pula dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas akan memoderasi hubungan pengendalian intern

dengan kualitas laporan keuangan. Yang dalam hal ini maka akan meningkatkan hubungan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Akuntabilitas memperkuat hubungan antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.